

**ANALISIS PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI
INDONESIA ATAS DUKUNGAN REPUBLIK VANUATU TERHADAP
GERAKAN KEMERDEKAAN PAPUA BARAT PADA TAHUN 2014-2019**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Anang Tamianda

14323071

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

**ANALISIS KONDISI POLITIK DALAM NEGERI YANG MEMPENGARUHI
RESPONS INDONESIA ATAS DUKUNGAN VANUATU TERHADAP
GERAKAN KEMERDEKAAN PAPUA 2014-2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memenuhi

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Diajukan Oleh

Anang Tamianda

14323070

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

Analisis proses pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia atas dukungan Republik Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat pada tahun (2014-2019) melalui kondisi politik domestik

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional Fakultas

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

16 Oktober 2020


Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

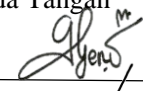

Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.


NIK. 123230101


Dewan Penguji:


1. Gustrieni Putri, S.I.P., M.A.
2. Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat
3. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int, MA
4. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A

Tanda Tangan









PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Anang Tamianda

No. Mahasiswa : 1434070

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis proses pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia atas dukungan Republik Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua barat pada tahun (2014-2019) melalui kondisi politik domestik

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 24 Oktober 2020

Yang menyatakan



Anang Tamianda

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi:

“Kedua Orang Tuaku”

Ucapan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda Jayamarta dan Ibunda Ratmi Bakti yang telah memberikan do'a, semangat, pengorbanan, dukungan, nasehat, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

“Kakakku”

Ucapan terima kasih kepada saudariku tersayang Desvira Utami Mardatilah atas semua do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

“Adekku”

Ucapan banyak terima kasih kepada saudaraku tersayang Rabil Satria atas semua do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

HALAMAN MOTTO

“Tuhan tidak merobah nasib suatu Bangsa sebelum Bangsa itu merobah nasibnya”

Soekarno~



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis proses pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia atas dukungan Republik Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat pada tahun (2014-2019) melalui kondisi politik domestik” yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional dapat berjalan dengan lancar.

Sholawat serta alam tak lupa senantiasa penulis haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, yang mana telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini sesuai ketentuan Allah SWT.

Dengan penuh kesadaran, penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Namun, penulis telah berusaha dengan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin agar hasil dari penulisan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak, terutama bagi para akademisi. Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak kendala, tetapi dengan usaha yang tak henti-hentinya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dengan itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A, selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang selama ini telah memberikan banyak ilmu, membimbing, nasihat, saran, dan telah membantu penulis.
4. Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan bimbingan, ilmu, dan motivasi selama belajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Serta telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi serta ilmunya.
5. Bapak Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selama ini telah memberikan bimbingan, motivasi serta ilmunya dari awal penulisan proposal sampai penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang dengan sabar telah memberikan ilmu, motivasi, dan pengalamannya dari awal perkuliahan sampai dengan saat ini.
7. Staf Program Studi Hubungan Internasional, Staf Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Staf Perpustakaan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan dan bantuan segala urusan selama ini.
8. Teman-teman dan sahabat di Prodi Hubungan Internasional, yang selama ini telah berbagi kebersamaan, kerjasama, kesenangan dan kesedihan, serta

bantuan dan do'anya. Saya selaku penulis berharap semoga tali persaudaraan kita tidak putus sampai di sini, Amin ya rabbal'amin.

9. Kedua orang tua yaitu Ayahanda Jayamarta dan Ibunda Ratmi Bakti yang telah memberikan do'a, semangat, pengorbanan, dukungan, nasehat, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.
10. Saudara kandung yaitu kakak dan adek sekalian atas semua do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu selama ini dan selama penulisan skripsi ini.

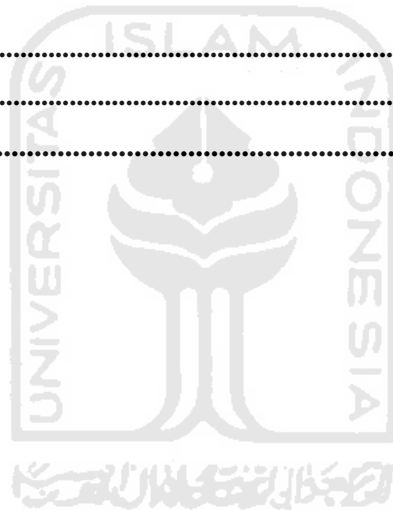
Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selain itu, selama ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekeliruan dan kekurangan, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan pada masa yang akan datang dan khususnya bagi pengembangan ilmu pada bidang Hubungan Internasional, Amin ya rabbal'amin.

Anang Tamianda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan penelitian	5
1.4 Signifikansi	5
1.5 Cakupan Penelitian	5
1.6 Tinjauan Pustaka	6
1.7 Landasan Teori	9
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 Jenis penelitian	14
1.8.2 Metode Pengambilan Data	15
1.8.3 Metode Analisa data	16

BAB II Faktor Birokrat dan Partai Politik dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan Indonesia	17
2.1 Respon Indonesia Atas Dukungan Vanuatu Terhadap Gerakan Kemerdekaan Papua	
17	
2.2 Birokrat dan Partai Politik sebagai Influencers	20
a. Birokrat.....	20
b. Partai Politik.....	23
BAB III Faktor Kelompok Kepentingan dan Media Massa dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan Indonesia	27
3.1 Kelompok Kepentingan.....	27
3.2 Media Massa.....	29
BAB IV.....	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Rekomendasi.....	38
DAFTAR PUSTAKA	40



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Partai Parlemen Indonesia 2014-2019	24
Tabel 2. Daftar Framing Media Netral di Indonesia	30
Tabel 3. Daftar Framing Media Negatif di Indonesia	31
Tabel 4. Daftar Framing Media Positif di Indonesia.....	32



DAFTAR SINGKATAN

DI/TII	: Darul Islam atau Negara Islam Indonesia
RMS	: Republik Maluku Selatan
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
ULMWP	: United Liberation Movement for West Papua
TPN-OPM	: Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka
NRFPB	: Negara Republik Federal Papua Barat
WPNCCL	: West Papua National Coalition for Liberation
PNWP	: West Papua National Parliament
PCWP	: Pacific Coalition for West Papua
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
HAM	: Hak Asasi Manusia
MSG	: Melanesian Spearhead Group
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
BKSAP	: Badan Kerjasama Antar Parlemen
KONTRAS	: Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KOMNAS HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
AMP	: Aliansi Mahasiswa Papua

ABSTRAK

Penelitian ini membahas proses yang mempengaruhi pengambilan kebijakan Pemerintah Indonesia atas dukungan Republik Vanuatu terhadap gerakan Kemerdekaan Papua pada tahun 2014-2019. Bahwa pada pemerintahan Jokowi adanya isu hubungan internasional yang mencuat atas klaimnya dari ULMWP yang mendapatkan tandatangan perisi 1, 8 juta dari masyarakat Papua Barat untuk mendukung Papua merdeka yang diserahkan kepada Ketua Dewan HAM PBB. Tentunya isu ini muncul disebabkan oleh Vanuatu yang memfasilitasi ULMWP untuk berbicara di hadapan internasional. Dengan melihat aspek kondisi politik dalam negeri, Pemerintah Indonesia melakukan cara-cara diplomatis dalam mengambil kebijakan tersebut untuk menyikapi persoalan yang dilakukan oleh Vanuatu. Maka daripada itu, hadirnya penelitian ini untuk menganalisis dari aspek kondisi politik dalam negeri melalui faktor birokrat, partai politik, kelompok kepentingan, dan media massa untuk melihat proses pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia atas dukungan Vanuatu terhadap gerakan Kemerdekaan Papua.

Kata Kunci : Indonesia, Vanuatu, Gerakan Kemerdekaan Papua

ABSTRACT

This research discusses the process that influences the Government of Indonesia's policymaking for the support of the Republic of Vanuatu for the Papuan Independence movement in 2014-2019. Whereas in the Jokowi administration there was an issue of international relations that shrank its claim from the ULMWP which received the 1.8 million mandate from the people of West Papua to support an independent Papua which was submitted to the Chair of the UN Human Rights Council. Of course, this issue arose because of Vanuatu, which facilitated ULMWP to speak before the international community. By looking at the aspect of domestic political conditions, the Government of Indonesia took diplomatic means in taking this policy to address the problems that were being carried out by Vanuatu. Therefore, the presence of this research is to analyze from the aspect of domestic political conditions through bureaucrats, political parties, interest groups, and the mass media to see the Indonesian government's policy-making process for Vanuatu's support for the Papuan Independence movement.

Keywords : Indonesia, Vanuatu, Papua Independence Movement

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah menghadapi beberapa pemberontakan. Di antara kelompok-kelompok yang melakukan pemberontakan lain adalah gerakan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (DI/TII), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) (Sahroji, 2017). Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada akhirnya dapat diredam. Gerakan seperti Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (DI/NII) dapat diredam dengan operasi militer. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat diselesaikan melalui meja perundingan atau negoisasi, antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Aspinall, 2005, pp. 6-9). Meskipun Indonesia telah berhasil dalam menyelesaikan beberapa masalah pemberontakan belum semua gerakan pemberontakan dapat diredam. Satu gerakan pemberontakan yang belum dapat diredam adalah Gerakan Papua Merdeka (Amindoni, 2018).

Gerakan kemerdekaan Papua telah dimulai sejak pada dekade bergabungnya Papua dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1962 (MacLeod, 2011, pp. 3-4). Organisasi Papua Merdeka muncul pada tahun 1960-an dengan dua fraksi, Pertama pimpinan Asser Demotekay pada 1963 Kedua, pimpinan Terianus Arrongoar pada 1965 (Mishael, 2016, p. 06). Tujuan utama dari gerakan ini adalah menuntut kemerdekaan Pulau Papua bagian barat untuk lepas dari Indonesia dan menjadi Negara independen. Dalam perkembangannya, gerakan kemerdekaan Papua tetap berdiri meski melalui pergantian beberapa Presiden Indonesia hingga pada masa

Presiden Joko Widodo. Meskipun memiliki satu tujuan yaitu untuk mendapatkan kemerdekaan dari Indonesia, namun fakta di lapangan banyak fraksi-fraksi baik bersenjata maupun tidak yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Di antaranya adalah Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Barat (TPN-OPM) pimpinan Goliath Tabuni dan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) pimpinan Benny Wenda (IPAC, 2015, pp. 2-3).

Upaya gerakan Papua untuk merdeka adalah menggunakan pendekatan militer seperti yang di lakukan oleh *Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka* (TPN-OPM), dan juga menggunakan pendekatan diplomasi seperti yang di lakukan oleh *United Liberation Movement for West Papua*. Akibatnya, sejalan dengan adanya pemberontakan secara militer, gerakan kemerdekaan Papua (Barat) juga mendapatkan dukungan dari beberapa Negara berdaulat di dunia, terutama berasal dari kawasan Pasifik Selatan (Kurniati, 2018).

Di antara Negara yang vokal menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan dan isu hak asasi manusia di Papua Barat adalah Republik Vanuatu. Dalam beberapa kesempatan Vanuatu secara terbuka mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia. Republik Vanuatu memfasilitasi pembentukan salah satu fraksi utama gerakan kemerdekaan Papua yaitu “*United Liberation Movement for West Papua*” pada tahun 2014 (United Liberation Movement for West Papua Official Website, 2018).

Pada tanggal 7 Desember 2014, beberapa fraksi-fraksi kemerdekaan Papua di antaranya “*Federal Republic of West Papua*” (NRFPB), “*National Coalition for Liberation*” (WPNCL) dan “*West Papua National Parliament*” (PNWP), berkumpul di Vanuatu untuk menghadiri acara penyatuan kemerdekaan Papua Barat dengan

pembentukan suara kemerdekaan WLMWP (United Liberation Movement for West Papua Official Website, 2018).

Vanuatu secara konsisten berusaha menyuarkan permasalahan di Papua melalui forum internasional seperti sidang Majelis Umum PBB dan Dewan HAM PBB. Dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun 2016 dan 2017, Vanuatu mewakili suara tujuh Negara Pasifik Selatan yaitu; Tonga, Nauru, Tuvalu, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon tergabung dalam “*Pacific Coalition for West Papua*” (PCWP) menyuarkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang di lakukan oleh Indonesia di Papua (Voa Indonesia, 2017). Pada 2019, Vanuatu bahkan memfasilitasi pertemuan pimpinan ULMWP yaitu Benny Wenda untuk bertemu ketua Dewan HAM PBB (Channel News Asia, 2019). Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Benny Wenda untuk menyerahkan petisi yang di klaim berisi 1.8 juta tanda tangan hasil referendum kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Vanuatu juga mendorong masuknya *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) dalam organisasi regional yaitu “*Melanesian Spearhead Group*”. Pada tahun 2015, ULMWP menyerahkan petisi yang berisi 150.000 tanda tangan kepada Vanuatu yang diklaim mewakili keinginan rakyat Papua agar ULMWP masuk ke dalam organisasi *Melanesian Spearhead Group*. Dengan dasar tersebut, Vanuatu menyerahkan petisi tersebut ke organisasi *Melanesian Spearhead Group*, hasil dari upaya ini adalah masuknya ULMWP dengan status *observer* dalam *Melanesian Spearhead Group* pada juni 2015 (MUSFIROH, 2018, p. 169).

Dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat mendapatkan respon dari dunia internasional. Respon tersebut dapat dilihat dari solidaritas yang di

berikan oleh sesama Negara Pasifik yang sama-sama menyampaikan pidato pelanggaran HAM oleh Indonesia di PBB (Muhaimin, 2017). Di luar itu, PBB tidak menanggapi petisi yang di berikan oleh Vanuatu, dengan menolak petisi tersebut (Saputra, 2018). Meskipun demikian penyampaian dan dukungan yang di berikan oleh Vanuatu memberikan dorongan terhadap upaya pengakuan internasional terhadap gerakan Papua Merdeka (Octaviyani, 2019).

Dengan dukungan secara terbuka yang di berikan oleh Republik Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat, tentu saja hal ini ditanggapi dengan serius oleh pemerintah Indonesia, mengingat hal ini melibatkan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai sebuah berdaulat yang menjadi tempat terjadinya peristiwa separatisme gerakan kemerdekaan Papua Barat tentu memberikan respon atas dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua tersebut. Di antara respon yang diberikan oleh Indonesia adalah salah satunya Kedubes Indonesia untuk Vanuatu dan Kemenlu, di mana mendorong untuk memberikan kecaman, lalu menggunakan diplomasi dalam kebijakannya. Hal ini dilandasi fakta bahwa dukungan negara Pasifik akibat adanya proganda dan penyimpangan fakta yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua. Dengan demikian penelitian ini berusaha untuk membahas mengenai proses yang mempengaruhi pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, di bawah presiden Joko Widodo atas masalah ini.

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana kondisi politik dalam negeri mempengaruhi respons Indonesia atas dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua?

1.3 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2014-2019 atas dukungan Republik Vanuatu terhadap Gerakan Kemerdekaan Papua.

1.4 Signifikansi

Penelitian ini berkontribusi untuk melihat perilaku aktor Negara (state actor) dalam melakukan proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap isu internasional yakni dukungan yang diberikan Republik Vanuatu atas gerakan Kemerdekaan Papua. Sebab, pada Pemerintahan Joko Widodo terdapat isu yang dapat dijustifikasi sebagai subjek internasional yakni dukungan Republik Vanuatu terhadap Gerakan Kemerdekaan Papua Barat, dari tokoh ULMWP yakni Benny Wenda dengan klaimnya mendapatkan tandatangan petisi 1,8 Juta dari masyarakat Papua Barat untuk mendukung Papua merdeka yang diserahkan kepada Ketua Dewan HAM PBB (Channel News Asia, 2019).

Maka daripada itu, hadirnya penelitian ini untuk mengisi maupun melengkapi penelitian sebelumnya yang belum membahas bagaimana proses pengambilan kebijakan Pemerintah Indonesia masa Joko Widodo tahun 2014-2019 atas dukungan Republik Vanuatu terhadap Gerakan Kemerdekaan Papua Barat terutama dalam faktor kondisi politik domestik.

1.5 Cakupan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini akan fokus dalam membahas proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap sikap Republik Vanuatu yang mendukung gerakan

kemerdekaan Papua dari Indonesia. Dengan demikian penelitian ini fokus kepada sikap pemerintah Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo. Adapun periode penelitian yang di ambil adalah pada tahun 2014-2019, hal ini dilandasi pada masa awal presiden Joko Widodo menjabat yaitu pada tahun 2014 dan pada masa studi kasus ini masih berlangsung yaitu 2019.

Sementara itu, dua organisasi kemerdekaan Papua yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini ialah Tentara Pembebasan Nasional-Organnisasi Papua Barat (TPN-OPM) dan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP). Penelitian ini menjadikan dua organisasi tersebut sebagai fokus karena keduanya memiliki hubungan dekat dengan Vanuatu. Dalam penelitian ini, kata "*Papua Barat*" tidak merujuk pada wilayah Provinsi Papua Barat yang merupakan salah satu Provinsi yang dikuasai Indonesia. Pemaknaan "*Papua Barat*" ini mengikuti pada wilayah yang sedang di perjuangkan untuk merdeka oleh kelompok separatis Papua Barat.

1.6 Tinjauan Pustaka

Kajian akademis mengenai tema respon Indonesia terhadap Negara-negara pendukung kemerdekaan Papua Barat menunjukkan ada beberapa tulisan ilmiah yang dapat menjadikan landasan awal sejauh mana jangkauan tulisan akademis terhadap tema ini. Decky Wosparik (2014) menjelaskan bahwa gerakan kemerdekaan Papua memiliki asal sejak masa penjajahan Jepang pada periode tahun 1942-1945. Perjuangan untuk merebut kemerdekaan juga di teruskan setelah Papua bergabung dengan Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Papua di dorong oleh rasa kekecewaan yang timbul dari ketidakadilan berupa minimnya pembangunan sumber daya manusia

dan infrastruktur di Papua yang dilakukan oleh pemerintah pusat Indonesia. Contohnya ialah pembagian saham Freeport yang berpuluh tahun tidak secara layak kepada orang asli Papua. Hal ini tentu menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Selain itu upaya kemerdekaan Papua juga didorong oleh adanya intimidasi ketika terjadi referendum Pepera di Papua. Dalam hal ini kelompok pro kemerdekaan Papua percaya bahwa intimidasi berupa ancaman senjata kepada tokoh adat Papua yang menghadiri Pepera. Sehingga mereka mengambil keputusan dengan terdesak. Dengan demikian maka, gelombang kemerdekaan Papua menjalankan perjuangan baik melalui cara militer maupun non-militer (Wospakrik, 2018, pp. 1-9).

Dalam Indonesia menyikapinya, Poltak Partogi Nainggolan (2014, Pp.188-97) menjabarkan cara Indonesia menyikapi aktivitas internasional yang dilakukan oleh gerakan Papua merdeka. Melalui dua cara yaitu militer dan diplomasi. Cara militer adalah pembangunan pangkalan militer dan melakukan operasi militer untuk menumpas kelompok di Papua. Sementara itu cara diplomasi adalah dengan ikut dalam kegiatan internasional seperti *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Namun menurut Nainggolan, Kemlu tidak menyiapkan desk khusus untuk Papua karena dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman dunia internasional (Nainggolan, 2014, pp. 188-97).

Tampubolon (2015, Pp.03-5) berpendapat bahwa dalam merespon gelombang dukungan dan simpatian kemerdekaan di Negara-negara Pasifik terhadap Papua Barat, Indonesia melakukan diplomasi secara langsung dengan “*Melanesian Spearhead Group*” (Tampubolon, 2015, pp. 03-5). Hasil dari diplomasi tersebut menghasilkan beberapa kerjasama teknik bersama Negara-negara *Melanesian*

Spearhead Group. Upaya ini juga menghasilkan *join Statement* antara *Melanesian Spearhead Group* dan Indonesia pada 2014 untuk salah satunya hormati kedaulatan masing-masing. Penelitian ini mengambil data pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut dengan data dari masa pemerintahan presiden Joko Widodo.

Elmslie (2015. P.100) berpendapat bahwa dalam menyikapi dukungan Negara-negara Pasifik terhadap kemerdekaan di Papua Barat disikapi dengan manuver diplomasi Indonesia pada forum internasional di kawasan Pasifik Oseania melalui "*Melanesian Spearhead Group*". Selain itu juga Indonesia melakukan diplomasi langsung terhadap Vanuatu, dengan mengundang mantan Perdana Menteri Soto Kilman ke Jakarta. Hal ini menjadi pendorong Indonesia berhasil bergabung ke *Melanesian Spearhead Group* (Elmslie, 2015, p. 100).

Di sisi lain dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat di jelaskan oleh Thomas (2016. Pp.573-80) yang menekankan pada pandangan di balik dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat beserta kepentingan (Temaluru, 2016, pp. 573-80). Vanuatu mendukung gerakan Papua Barat untuk merdeka dari Indonesia karena di dorong oleh sentimen politik dalam negeri yang kuat. Sentimen ini menjunjung ide "*Melanesian Renaissance*" dan sosialisme Melanesia. Sosialisme Melanesia percaya bahwa bangsa Melanesia harus membantu satu sama lain melawan musuh, dalam hal ini yang menindas bangsa Melanesia. Adanya kekuasaan Indonesia di Papua Barat di anggap sebagai kolonialisme bangsa asing terhadap bangsa Melanesia di Papua Barat. Dengan demikian diperlukan

perjuangan untuk mendukung terbebasnya bangsa Melanesia dari Indonesia. Sehingga kerap mendukung gerakan Papua Barat untuk merdeka.

Sabir (2018. Pp.1-7) menjelaskan lebih lanjut upaya diplomasi Indonesia terhadap Vanuatu, agar Negara tersebut tidak mendukung gerakan pro kemerdekaan Papua Barat (Sabir, 2018, pp. 1-7). Di antara upaya Vanuatu adalah dengan mengundang beberapa tokoh politik ternama Vanuatu serta memberikan beberapa bantuan asing teknologi. Meskipun begitu, Ahmad Sabir mencatat bahwa upaya diplomasi publik yang di lakukan oleh Indonesia gagal karena beberapa faktor. Di antara faktor-faktornya ialah dukungan kuat dari publik Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua. Serta isu ini kerap di politisasi menjadi isu bersama yang di perjuangkan oleh politisi arus utama di Vanuatu. Selain itu diplomasi intensif yang di lakukan oleh gerakan pro kemerdekaan Papua Barat semakin meningkat. Dengan demikian dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat tetap ada.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dilihat bahwa respon Indonesia selama ini bersifat lembut terhadap Vanuatu yaitu melalui diplomasi. Meskipun demikian belum dijelaskan respon-respon lain yang kerap dilakukan Indonesia. Juga tidak terdapat penulis yang mengambil spesifik mengenai respon Indonesia di lima tahun terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengambil fokus pada pemerintahan presiden Joko Widodo (2014-2019) dalam merespon dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat.

1.7 Landasan Teori

Decision Making-Proces

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Decision Making-Proces*. Pada awalnya asumsi dari pendekatan ini di kemukakan oleh William D. Coplin untuk menjelaskan proses pembentukan kebijakan atau keputusan luar negeri. Dalam hal ini Cooplin menjelaskan bahwa keputusan atau kebijakan luar negeri tercipta karena dipengaruhi oleh tiga faktor determinan. Ketiga faktor determinan tersebut ialah pertama Kondisi Domestik, kedua Kondisi Ekonomi dan Militer, ketiga Konteks Internasional. Dalam hal ini respon Indonesia (Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019) atas dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat di analisis dengan salah satu faktor determinan tersebut. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai tiga faktor determinan tersebut adalah sebagai berikut:

William D. Cooplin menjelaskan bahwa kondisi politik dalam negeri dapat berpengaruh terhadap pembuatan keputusan luar negeri oleh suatu negara. Coplin juga menyebutkan ada empat aktor/influencer dalam negeri yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan yaitu birokrat, partai politik, kelompok kepentingan dan media masa (Coplin W. D., 2003, p. 81). Dengan demikian maka penelitian ini akan meninjau empat aspek influencer tersebut, baik dari sisi birokrasi seperti Kementerian luar negeri sebagai eksekutor yang mempertimbangkan langkah diplomasi dan organ pemerintah lain, sementara itu dari sisi partai politik maka akan meninjau pembahasana mengenai isu ini dalam partai politik yang ada dalam dewan perwakilan rakyat periode 2014-2019. Dalam kelompok kepentingan maka juga akan membahas mengenai masyarakat Papua dalam konteks ini juga dapat diwakili dengan pemerintah daerah Papua dan organisasi adat Papua serta kelompok-kelompok lain di

luar Papua yang mewakili perhatian terhadap isi ini. Terakhir ialah media masa, bagaimana media masa di Indonesia terutama media digital dalam melakukan pemberitaan mengenai isu ini. Setelah itu meninjau aspek influencer mana yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan (Coplin W. D., 2003, pp. 73-88).

Adapun hal penting lainnya menurut William D. Coplin dalam teori pengaruh kebijakan hubungan antar aktor-aktor politik disebut dengan *policy influencer*. *Policy influencer* adalah sebagai aktor politik domestik dalam pengambilan keputusan (Coplin W. D., 2003, p. 74). Konteks ini bekerja secara timbal balik antara pengambil keputusan dan *policy influencer* sebagai *bargaining position* dalam sumber dukungannya untuk dapat mengambil keputusan. Jika ini tidak terpenuhi, maka dukungan dari *policy influencer* kepada pengambil keputusan akan hilang. Kendati pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan ini secara positif, akan tetapi mengakomodasikan sampai batas tertentu untuk dapat mengabaikan tuntutan ini (Coplin W. D., 2003, p. 76). Coplin menjabarkan menjadi empat macam tipologi perbedaan *policy influencer* dalam teorinya tersebut.

1. *Bureaucratic influencer*, disebut juga pengaruh dari birokrat dalam pengambilan keputusan merupakan hal yang lumrah di setiap negara modern. Birokrat ini mengacu kepada individu maupun organisasi dalam eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun, serta melaksanakan kebijakan. Kelompok-kelompok birokrat ini sering memberikan informasi untuk pengambilan keputusan serta digunakan sebagai instrument bagi pelaksana keputusan tersebut (Coplin W. D., 2003, p. 82)

2. *Partisan influencer*, disebut juga partai politik yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Partai politik bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politis yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Partai politik dalam negara demokrasi dianggap penting demi keberlangsungan rezim yang ada, sehingga suaranya sering didengar (Coplin W. D., 2003, p. 84).
3. *Interest influencer*, disebut juga kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Kelompok kepentingan tidak sebesar partai politik, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber untuk mendapatkan dokumen dari pengambil keputusan. Kelompok kepentingan ini biasanya memiliki sumber finansial yang besar sebagai nilai tawar dalam mempengaruhi pengambil keputusan (Coplin W. D., 2003, p. 87).
4. *Mass influencer*, disebut juga opini public yang mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Opini public ini muncul dikarenakan mudahnya akses masyarakat terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan kebijakan, berita-berita yang muncul setiap hari, hingga upaya-upaya pers dalam menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat luas yang berimbas dapat mempengaruhi pemerintah sebagai pengambil kebijakan (Coplin W. D., 2003, p. 87).

William D. Cooplin berpendapat bahwa faktor determinan kedua adalah kondisi ekonomi dan keamanan. Dalam hal ini Coplin berpendapat bahwa kondisi ekonomi suatu Negara berpengaruh dalam penentuan sebuah kebijakan luar negeri.

Disamping itu, Coplin juga menerangkan bahwa kemampuan militer dan jaminan keamanan atau tantangan keamanan merupakan salah satu dari dua faktor yang mendorong terciptanya kebijakan luar negeri suatu Negara (Coplin W. D., 2003, p. 115). Faktor determinan terakhir adalah konteks internasional, dalam hal ini Coplin menjelaskan bahwa kondisi internasional yang saat itu terjadi berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan atau keputusan politik luar negeri suatu Negara. Dalam hal ini baik terjadi dalam level bilateral maupun multilateral (Coplin W. D., 2003, p. 165).

Di antaranya argumentasi mengenai determinan ekonomi dan keamanan, Adanya ketidaksesuaian antara kajian studi mengenai determinan tersebut dengan pengaruh dari respons sebuah negara dalam menghadapi masalah konflik geografis. *Pertama*, Coplin menjelaskan bahwa penaksiran kapasitas ekonomi suatu negara harus mencakup analisis tentang kemakmuran negara tersebut, sejauh mana kekayaan itu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan pola-pola pertumbuhan ekonominya. Di mana upaya pembangunan ekonomi yang menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan luar negeri dalam menjawab prospek negara untuk mengalami pertumbuhan (Coplin W. D., 2003, hal. 115). Adapun aspek analisis dan topik pada penelitian ini tidak mengkaji mengenai potensi dari prospek ekonomi Indonesia untuk membangun pertumbuhan ekonomi.

Kedua, Coplin menjelaskan bahwa kendati masalah keamanan menjadi tugas utama, namun pengambil keputusan politik luar negeri melihat ini sebagai bentuk peperangan yang terjadi di dalam negeri yang akan meruntuhkan rezim pemerintahan yang ada atau akan menimbulkan kehancuran (Coplin W. D., 2003, hal. 129). Sementara kajian penelitian ini, tidak berpotensi atau memiliki misi dan visi dalam

menjatuhkan rezim, diketahui bahwa gerakan kemerdekaan Papua sebagai bentuk upaya memisahkan wilayah tersebut dari Indonesia, dan Vanuatu hadir untuk memfasilitasi. *Ketiga*, Coplin memberikan catatan bahwa orang-orang yang membuat politik luar negeri tidak selamanya mempersepsi konteks internasional, mengingat terbatasnya peran yang dimainkan oleh konteks internasional dalam menentukan politik luar negeri (Coplin W. D., 2003, hal. 167). Artinya, konteks internasional tidak mempengaruhi atau tidak dapat menggugurkan determinan lainnya dalam memenuhi aspek analisis.

Maka pada penelitian ini penulis akan menggunakan salah satu di antara ketiga faktor determinan tersebut yakni faktor dari kondisi politik dalam negeri. Faktor ini paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan Indonesia terhadap Vanuatu dalam dukungan Negara tersebut terhadap Gerakan Kemerdekaan Papua Barat. Pendekatan ini dirasa tepat digunakan mengingat determinan pertama lebih fokus pada proses pengambilan kebijakan luar negeri, sehingga tidak mengaburkan aspek analisis yang diteliti. Sebab, adanya dua determinan lain yakni keamanan dan ekonomi serta aspek internasional akan menambah analisis ini jauh lebih luas. Adapun, determinan pertama memiliki empat tipologi yang telah spesifik menganalisis proses pembuatan kebijakan Pemerintah Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Secara definisi metode kualitatif adalah sebuah metode yang memiliki hasil berupa penjelasan atau naratif (Albi Angggito, 2018, p. 07). Penjelasan tersebut akan

didasarkan pada data atau temuan yang sudah didapat yang berupa opini, perilaku ataupun kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia atas dukungan Republik Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penjelasan kualitatif mampu memberikan penjelasan yang mendalam. Sehingga hasil yang akan didapat nantinya akan berupa deskripsi mengenai respon pemerintah Indonesia serta analisa mengenai respon pemerintah Indonesia tersebut.

1.8.2 Metode Pengambilan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan studi literatur. Studi literatur adalah metode penelitian yang menggunakan data yang ada dalam perpustakaan, sehingga data bersifat sekunder tanpa melibatkan riset lapangan (Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, 2004, pp. 1-2). Dalam pelaksanaannya, metode ini mengharuskan untuk mengumpulkan data-data pustaka yaitu buku, jurnal, website, laporan dan dokumen-dokumen lain, setelah itu mencari data yang dituju, kemudian mengolah menjadi tulisan deskriptif. Impelementasi metode ini juga memiliki kelemahan yaitu harus mencari semua data yang terkait. Meskipun demikian dapat diatasi dengan proses pencarian yang komprehensif (Zed, 2004, pp. 10-20).Tema yang dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan Indonesia terhadap dukungan Vanuatu kepada gerakan kemerdekaan Papua. Sehingga hasil yang akan dicapai ialah terkumpulnya refrensi-refrensi yang relvan untuk menjabarkan dan menganalisa lebih dalam mengenai

proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas dukungan Republik Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat.

1.8.3 Metode Analisa data

Dalam metode analisis data, metode penelitian kualitatif mengharuskan untuk melakukan “*Indwelling*” yaitu proses memahami atau membaca konteks dari kejadian yang terjadi. Dengan demikian maka membaca situasi merupakan hal yang penting dalam metode penelitian kualitatif. Dengan demikian penjabaran mengenai hal-hal sebelumnya diperlukan untuk membaca dan memahami kejadian yang terjadi (Morehouse, 1994, pp. 23-35). Dengan dasar ini maka tersusun lah metode analisis data sebagai berikut; *pertama*, bab 1 menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Dengan demikian arah penelitian, cakupan penelitian, serta rumusan masalah penelitian dijabarkan dalam bab ini. *Kedua*, bab 2 menjabarkan mengenai data-data yang dibutuhkan secara rinci dan menganalisisnya salah satunya menjelaskan keempat tipologi dari faktor determinan politik domestik yang akan dipecahkan menjadi dua dalam bab ini yaitu Birokrat dan Partai Politik. *Ketiga*, bab 3 tetap pada menjabarkan mengenai data-data yang dibutuhkan secara rinci lalu menganalisis kedua determinan selanjutnya yaitu Kelompok Kepentingan dan Media Massa. Adapun, analisis disampaikan dengan tujuan teori dan penjelasan deskriptif. *Keempat*, bab 4 digunakan untuk menyimpulkan dari semua pembahasan yang telah diberikan dari hasil menerangkan analisis keempat tipologi pada determinan politik domestik.

BAB II

Faktor Birokrat dan Partai Politik dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan Indonesia

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai dua sub-bab besar yaitu *pertama*, mengenai penjelasan tentang respon Indonesia atas dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua. *Kedua*, setelah menjelaskan mengenai poin tersebut maka bab ini akan memulai pada penjelasan kedua yaitu penjelasan tentang variabel pertama dalam teori Decision Making Process versi William D. Coplin, dalam penjelasan kedua akan dijelaskan mengenai empat *influencers* yang telah diterangkan oleh William D. Coplin, ke-empat hal tersebut adalah Birokrat, Partai Politik, Kelompok Kepentingan dan Media Massa.

2.1 Respon Indonesia Atas Dukungan Vanuatu Terhadap Gerakan Kemerdekaan Papua

Pada pembahasan pada bab 1 telah dijelaskan mengenai bentuk-bentuk dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat. Diantara dukungan yang diberikan Vanuatu adalah dengan adanya dukungan baik bilateral dan multilateral atas gerakan kemerdekaan Papua Barat. Diantara alasan Vanuatu mendukung gerakan kemerdekaan Papua Barat adalah sebagai sebuah Republik, Vanuatu merupakan sebuah negara kecil yang terletak di Samudra Pasifik, dengan mayoritas penduduk dengan Ras Melanesia. Atas dasar kesamaan ras ini pula Vanuatu memberikan dukungan terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.

Dasar dukungan didorong oleh adanya tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Indonesia di Papua Barat. Beberapa kelompok bahkan menyebut apa yang terjadi di Papua sebagai pembunuhan sistematis yang menasar etnis asli Papua. Dengan demikian apa yang terjadi di Papua dapat dikategorikan sebagai pembersihan etnis atau genosida. Tuduhan ini juga disebutkan dengan menunjukkan bahwa lebih dari setengah juta rakyat asli Papua telah dibunuh oleh pemerintah Indonesia sejak era Sukarno. Dengan alasan-alasan ini maka Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua Barat.

Indonesia sebagai sebuah Negara berdaulat yang menjadi tempat terjadinya peristiwa separatisme gerakan kemerdekaan Papua Barat tentu memberikan respon atas dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua tersebut. Diantara respon yang diberikan oleh Indonesia adalah sebagai berikut; *Pertama*, melakukan diplomasi bilateral dengan Vanuatu, Indonesia secara aktif melakukan diplomasi terhadap Vanuatu. Diantara bentuk diplomasi bilateral yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Vanuatu adalah dengan memberikan berbagai bantuan terhadap negara tersebut. Diantara bantuan yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan memberikan bantuan dana sebesar US 2 juta dollar ketika terdampak badai Pam Pam. Disamping itu Indonesia juga menjalin upaya diplomasi lain dalam bidang teknologi, pertanian, pendidikan, peternakan dan lain-lain. Hal ini dianggap sebagai bagian dari diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia secara langsung terhadap Vanuatu (Sabir, 2018, p. 97).

Dalam konteks hubungan bilateral, respon paling keras dari Indonesia atas dukungan Vanuatu terhadap gerakan Kemerdekaan Papua adalah dengan melakukan

kecaman diplomatik, kritik pelanggaran hak asasi manusia serupa, serta ancaman untuk Vanuatu agar tidak melakukan intervensi urusan domestik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh wakil presiden Jusuf Kalla pada sesi debat terbuka sidang umum PBB ke 73. Dalam acara tersebut Vanuatu kerap melakukan kritik bahkan mencoba untuk memasukan pemimpin separatis Benny Wenda ke dalam sidang. Sehingga hal ini memantik kecaman dari Jusuf Kalla, sebagai individu yang mewakili Indonesia pada forum tersebut;

“Indonesia tidak akan tinggal diam bila negara kepulauan Vanuatu terus mengusik kedaulatan teritori Indonesia,”. Dalam hubungan ini, Indonesia sangat menyesalkan upaya Vanuatu untuk mendukung atau bahkan yang terburuk menjadi bagian dari gerakan separatis di Papua. "Tindakan permusuhan ini tidak memiliki tempat di sistem PBB. Suatu tindakan yang jelas melanggar prinsip-prinsip PBB (Sihombing, 2018)”.

Dengan pernyataan dari Jusuf Kalla maka dapat diketahui bahwa respon maksimal Indonesia terhadap dukungan Vanuatu atas gerakan kemerdekaan Papua adalah dengan melakukan kecaman dan kritik, tidak dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Melainkan Indonesia merespon dengan sikap-sikap diplomatis, bahkan pada ketegangan diplomatik tertinggi dengan Vanuatu saat menyelundupkan Benny Wenda pada sidang HAM PBB.

Kedua, disamping melakukan diplomasi bilateral *government to government*, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya diplomasi multilateral dengan melakukan partisipasi dalam kegiatan multilareal untuk membuat citra positif Indonesia di dunia Melanesia. Hal ini dilandasi pada fakta bahwa Indonesia merupakan dengan jumlah penduduk Melanesia terbesar di dunia. Untuk ini

Indonesia melakukan beberapa hal, diantaranya mendeklarasikan *Indonesian Melanesia Brotherhood* di Ambon pada tahun 2015, mengadakan Festival Budaya Melanesia di Kupang dan Ambon yang di ikuti oleh beberapa negara Pasifik (Ambon, 22). Disamping itu Indonesia juga berusaha mendekatkan diri dengan dunia Melanesia dengan menjadi observer pada *Melanesian Spearhead Group* (MSG) yang merupakan organisasi regional bagi negara-negara rumpun ras Melanesia (Kemlu, 2019). Upaya Indonesia untuk masuk menjadi anggota tetap dan terlibat aktif dalam MSG merupakan usaha untuk melakukan blok terhadap partisipasi gerakan kemerdekaan Papua pimpinan Benny Wenda yang bernama “ULMWP” yang juga mendapatkan status observer pada organisasi regional tersebut. Sehingga Indonesia dalam hal ini juga merespon dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua juga dengan melakukan tindakan diplomatik.

Dari apa yang telah diterangkan maka Indonesia menggunakan cara-cara soft-power untuk merespon dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua merdeka. Alih-alih menggunakan hard-power, Indonesia justru menggunakan soft power dalam hal ini diplomasi sebagai sarana untuk merespon dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua.

2.2 Birokrat dan Partai Politik sebagai Influencers

a. Birokrat

Dalam penjelasannya, William D. Coplin menerangkan bahwa birokrat adalah kelompok yang masih masuk dalam bawahan birokrasi pemerintah. Maka terdapat beberapa kementerian yang terlibat dalam hal ini. Diantaranya adalah sebagai berikut;

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu)

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia merupakan kementerian terdepan yang menjembatani misi diplomatik Indonesia ke luar negeri. Termasuk dalam hal ini dalam menyikapi dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua. Dalam hal ini Kementerian luar negeri Indonesia dipimpin oleh Menteri Retno Marsudi, yang menjadi menteri selama kabinet pertama presiden Joko Widodo pada rentang waktu 2014 hingga 2019. Dibawah kepemimpinan Retno Marsudi Indonesia merespon sikap Vanuatu tersebut dengan cara cara diplomatis.

Komitmen menteri Retno Marsudi dalam menjaga kedaulatan Indonesia atas Papua selalu ditekankan dalam beberapa kegiatan.

"Saya ingin menegaskan, bahwa kita tidak pernah akan mundur apabila ini sudah menyangkut mengenai sovereignty, (kedaulatan) integritas wilayah Indonesia" (Medcom, 2018).

Dengan kutipan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia di bawah Retno Marsudi berkomitmen dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Meskipun demikian Indonesia tidak menggunakan hardpower dalam rangka menggertak Vanuatu. Melainkan menggunakan soft power, seperti melakukan diplomasi publik, melakukan kritik, melakukan hak jawab dalam sidang PBB dan lain-lain. Yang mana soft power hal-hal ini dianggap sebagai langkah yang lebih efektif daripada hard power (Omega, 2017, p. 63).

Di samping Kemenlu, entitas bawah yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru dan Vanuatu juga berperan penting dalam tercetusnya upaya

untuk merangkul Vanuatu melalui diplomasi. Dalam hal ini Duta Besar Tantowi Yahya menekankan bahwa Indonesia perlu untuk merangkul negara-negara Pasifik yang selama ini mendukung gerakan Papua merdeka termasuk Vanuatu. Hal tersebut perlu dilakukan karena Tantowi Yahya menilai selama ini ULMWP sangat gencar dalam menyebarkan propaganda dalam berbagai lapisan masyarakat di Vanuatu, mulai dari pemerintahan hingga non-pemerintahan. Dengan demikian maka tidak heran apabila muncul gerakan yang masif di Vanuatu yang mendukung kemerdekaan Papua. Dukungan Vanuatu terhadap Papua bahkan juga telah masuk dalam konstitusi Vanuatu yang mana dalam konstitusi disebutkan bahwa tugas Vanuatu adalah membebaskan bangsa Melanesia, termasuk Papua dari jajahan bangsa asing (Sudrajat, 2017).

Propaganda kelompok separatis yang sangat luas, ditambah kurangnya partisipasi aktif pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi. Maka kondisi demikian yang mendorong meluasnya propaganda kemerdekaan Papua di Vanuatu. Kondisi yang demikian, mendorong Tantowi Yahya sebagai duta besar Indonesia untuk Selandia Baru dan Vanuatu untuk mengeluarkan ide. Diantaranya adalah penggunaan diplomasi terutama untuk melakukan argumen balasan dari propaganda kelompok kemerdekaan Papua di Vanuatu dan pasifik pada umumnya. Diantaranya adalah menambah kunjungan antar pejabat tinggi ke Vanuatu, karena selama ini pejabat tinggi yang berkunjung ke Vanuatu hanya terbatas pada penyerahan surat kedutaan besar Indonesia ke Vanuatu. Serta melibatkan Vanuatu dalam beberapa acara diplomasi publik diantaranya yang berkaitan dengan festival budaya Melanesia yang

digelar beberapa kali di Indonesia, juga secara aktif terlibat dalam diplomasi multilateral di Pasifik dengan menyelenggarakan beberapa acara salah satunya Pacific Expo 2019 yang mendatangkan lebih dari 20 negara. Dengan adanya upaya diplomasi maka diharapkan akan membantu Indonesia dalam menjelaskan masalah Papua ke dunia (Sudrajat, 2017).

b. Partai Politik

Menurut William D. Coplin, partai politik adalah kelompok politik yang tergabung dalam parlemen di sebuah Negara. Oleh karenanya terdapat beberapa partai politik yang secara vokal mengemukakan suaranya pada isu dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat. Dalam hal ini, *influencer* kedua adalah partai politik yang ada di Indonesia. Dalam parlemen Indonesia terdapat dua kubu yaitu pemerintah dan oposisi, yang mana pemerintah dipimpin oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan oposisi yang dipimpin oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Disamping itu juga terdapat beberapa partai politik lain, yang mana dapat dilihat pada table II.1.

Dalam menyikapi dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pihak pemerintah dan oposisi. Melainkan terdapat satu suara yang kuat yang sama. Dalam menyikapi dukungan Vanuatu terhadap gerakan Papua merdeka, dari kritik yang diberikan Vanuatu dalam sidang PBB hingga upaya Vanuatu yang mencoba menyelundupkan pemimpin ULMWP yaitu Benny Wenda, DPR RI mengecam dengan keras tindakan ini. Ketua

Komisi 1 dari Fraksi PKS yaitu Abdul Haris mengecam bahkan mengusulkan agar pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang hubungan Indonesian dan Vanuatu ;

“Kami memprotes sikap Vanuatu yang secara terbuka mendukung upaya separatisme Papua. Apalagi ini bukan pertama kalinya Vanuatu mengusik urusan kedaulatan Indonesia atas Papua, “Jika diperlukan, pemerintah bisa meninjau kembali hubungan diplomatik dengan negara yang terletak di Samudera Pasifik bagian selatan itu” (DPR , 2018).

Sementara itu anggota DPR lain yang berasal dari fraksi Golkar Satya Yudha mengutuk keras upaya penyelundupan Benny Wenda dan delegasi pro-Papua merdeka dalam sidang HAM PBB oleh Vanuatu.

“Maka kami mengutuk keras sikap Vanuatu yang mengakomodasi (kepentingan Benny), karena tidak mungkin Benny Wenda masuk begitu saja tanpa disepakati oleh ketua delegasi” (Antaraneews, 2019).

No.	Partai
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)
3.	Partai Demokrat (PD)
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
5.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
6.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
7.	Partai Amanat Nasional (PAN)

8.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
9.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

DPR sebagai sebuah satu kesatuan juga mengecam tindakan yang dilakukan oleh Vanuatu yang dianggap mencampuri urusan domestik Indonesia. DPR juga mengkritik kinerja Kementerian luar negeri Republik Indonesia yang mana dinilai kurang kuat dalam sektor diplomasi. DPR meminta dengan berbagai kejadian yang dilakukan oleh Vanuatu dalam mendukung gerakan kemerdekaan Papua di level Internasional, dapat ditanggulangi dengan penguatan diplomasi Indonesia. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) yang juga anggota komisi VII Rofi Munawar menyoroti akar masalah yang menyebabkan beberapa kejadian terakhir dalam hal dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua.

“Vanuatu dan beberapa Negara di kepulauan pasifik terus menerus memberikan kesempatan dan membantu menyuarakan kepentingan organisasi Papua Merdeka. Mereka nampak mendapatkan informasi yang berat sebelah dan keliru, terlebih organisasi Papua Merdeka kerap mengaitkan masalah ini sebagai persoalan rumpun Melanesia, (Kumaran, 2019)”.

Disamping memahami akar permasalahan DPR juga menyoroti kinerja diplomasi Indonesia dan mendorong pemerintah untuk lebih kuat lagi dalam melakukan diplomasi, terutama strategi mengenai masalah Papua. Dalam hal ini pernyataan DPR diawali oleh ucapan anggota

“Kita mengecam langkah yang diambil oleh Vanuatu di KTHAM PBB, namun demikian peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi delegasi Indonesia untuk lebih baik lagi dalam memperkuat strategi diplomasi terkait masalah Papua (Kumparan, 2019),”

Selain mendukung secara gagasan, DPR RI juga terlibat secara langsung dalam penguatan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia di kawasan Pasifik pada acara Pacific Expo 2019 yang juga menyoroti diplomasi publik terhadap negara-negara pasifik termasuk Vanuatu. Petinggi-petinggi DPR RI yang hadir terdiri dari Wakil Ketua DPR RI yaitu Fahri Hamzah, Fadli Zon dan Agus Hermanto. Juga ketua Badan Kordinasi Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf serta anggota DPR lain yaitu Reni Marlianawati, Teguh Juwarno. Dalam kesempatan tersebut Fahri Hamzah selaku ketua delegasi menyampaikan bahwa;

“Kita hadir memberi support terhadap upaya memajukan diplomasi, ekonomi dan budaya Indonesia di kawasan Pasifik. Ini strategis dan berdampak positif bagi Indonesia dan kawasan” (Media Indonesia, 2019).

Dengan demikian maka diketahui bahwa partai politik dan parlemen Indonesia juga mendukung upaya terhadap diplomasi pemerintah Indonesia terhadap negara-negara Pasifik termasuk Vanuatu yang vokal dalam mendukung gerakan kemerdekaan Papua. Hal ini tidak lain juga di dorong oleh lemahnya diplomasi Indonesia dalam meluruskan propaganda kelompok ULMWP yang selama ini bergerak secara aktif di kawasan Pasifik.

BAB III

Faktor Kelompok Kepentingan dan Media Massa dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan Indonesia

Pada bab ini akan melanjutkan proses yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia atas dukungan Vanuatu terhadap gerakan Kemerdekaan Papua. Melalui empat variabel yang dipaparkan oleh William D. Coplin yaitu mengenai *influencer* yakni Birokrat, Partai Politik, Kelompok Kepentingan, dan Media Massa. Yang kelanjutan bab ini akan menganalisis melalui variabel Kelompok Kepentingan dan Media Massa.

3.1 Kelompok Kepentingan

Dalam hal ini kelompok kepentingan adalah kelompok yang memiliki kepentingan terhadap isu kepentingan dalam isu yang sedang dibicarakan. Pada isu dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua, terdapat beberapa kelompok kepentingan yang bermain dalam isu ini. Diantara kelompok kepentingan yaitu Komnas HAM, Kontras, Aliansi Mahasiswa Papua dan Pemerintah Daerah Papua.

Pertama, Komisi nasional Hak Asasi Manusia dan Kontras. Dua entitas perjuangan hak asasi manusia ini menyoroti pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok di Papua. Hal ini relevan mengingat tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh Vanuatu ke Indonesia adalah adanya pelanggaran hak asasi manusia dan genosida di Papua. Meskipun tidak keduanya melaporkan bahwa tidak terdapat Genosida, namun masih terdapat beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang

pernah dan sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua. Oleh karena itu Komnas HAM saat Indonesia terpilih menjadi anggota dewan HAM PBB, menyarankan Indonesia agar menjadikan Papua sebagai prioritas. Sementara itu LSM Kontras menekankan bahwa pendekatan keamanan represif yang dilakukan oleh Indonesia dalam melawan kelompok separatis di Papua agar dihentikan. Hal ini dianggap dapat menghasilkan jatuhnya korban jiwa lebih banyak dan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas (Jawapos, 2019). Hal-hal yang menjadi kekhawatiran Komnas HAM dan Kontras berpengaruh kepada pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang diplomatis, terutama dalam menghadapi kelompok separatis Papua, beserta dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua.

Kedua, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan, AMP tidak segan dalam menyuarakan sikap pro terhadap gerakan kemerdekaan Papua. AMP menyelenggarakan demonstrasi untuk menuntut referendum di beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta dan Bali. Dalam tuntutanannya AMP kerap meminta Indonesia untuk mengizinkan bangsa Papua untuk melakukan referendum dan menentukan nasib sendiri untuk merdeka. Dengan demikian maka diketahui bahwa AMP merupakan organisasi mahasiswa yang pro terhadap kemerdekaan Papua. Dalam menyikapi dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua, AMP meminta mendukung upaya untuk Vanuatu agar membuka penyidikan pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia di Papua. Bahkan AMP melakukan aksi demonstrasi di 7 Kota untuk mendukung Vanuatu dan negara Pasifik lainnya dalam membawa kasus pelanggaran HAM Papua di PBB. Serta mengucapkan

terima kasih kepada Vanuatu atas dukungan diplomatik yang diberikan Vanuatu terhadap perjuangan kemerdekaan Papua (Suara Papua, 2014). Dengan demikian maka sangat jelas bahwa kelompok pro separatis di dalam negeri Indonesia juga mendukung narasi dan aksi yang dilakukan oleh Vanuatu. Hal ini yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia juga pada akhirnya menyetujui tindakan untuk menggunakan cara-cara diplomatis.

3.2 Media Massa

Dalam hal ini media massa merujuk pada aktivitas jurnalisme yang dilakukan dalam suatu Negara yang dapat melakukan penggiringan opini. Dalam hal ini media massa berperan sebagai agen untuk melakukan framing pada suatu isu. Menurut William D. Coplin terdapat tiga bentuk framing yang dapat dilakukan oleh media yaitu positif, netral dan negatif. Masing-masing pemberitaan atau pembuatan opini ditujukan untuk membuat salah satu dari tiga bentuk framing tersebut. Dalam kasus dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat, pemerintah Indonesia telah menggunakan media massa sebagai alat untuk menjawab berbagai progaganda yang dituduhkan oleh Vanuatu dan kelompok pro-kemerdekaan Papua Barat, salah satunya dengan menerbitkan artikel berjudul "*No Genocide in Papua*". Upaya ini juga pernah menjadikan Sekretaris Jendral PBB saat itu Ban Ki Moon pada 2016 percaya bahwa tidak terdapat Genosida di Papua, tepat seperti apa yang kerap dituduhkan oleh Vanuatu dan kelompok separatis Papua (Sabir, 2018, p. 99).

Di samping itu media-media Indonesia juga tidak dapat secara serentak membangun satu narasi baik itu positif, netral ataupun negatif, hal ini karena

Indonesia adalah negara demokratis yang menjamin kebebasan pers untuk menyampaikan berita dan opini. Dengan demikian terdapat berbagai varian opini yang dibentuk oleh media. Di antaranya adalah media-media yang membentuk framing netral terhadap dukungan Vanuatu terhadap Gerakan kemerdekaan Papua Barat. Bahkan dalam hal ini topik yang dibawa menyita perhatian publik karena menyangkut maruah Indonesia dalam level internasional. Di antara beberapa media yang memberitakan secara netral mengenai isu dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua. Dalam hal ini netral adalah yang hanya memberitakan kejadian, dalam hal ini sebagai berikut.

Tabel 2. Daftar Framing Media Netral di Indonesia		
1	CNN Indonesia	“Vanuatu si Kecil di Pasifik Pendukung Kemerdekaan Papua” https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191002160752-113-436136/vanuatu-si-kecil-di-pasifik-pendukung-kemerdekaan-papua
2	Metro Tv	“Diplomasi Menjaga Papua di PBB” https://www.metrotvnews.com/play/KYVCn5nX-diplomasi-menjaga-papua-di-pbb
3	Merdeka	“Vanuatu Angkat Isu Papua di PBB Indonesia Sebut Negara itu Dukung Separatis” https://www.merdeka.com/dunia/vanuatu-angkat-isu-papua-di-pbb-indonesia-sebut-negara-itu-dukung-separatis.html
4	Republika	“Hubungan Diplomatik Dengan Vanuatu Perlu Ditinjau Kembali” https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/10/02/pfy4kt335-hubungan-diplomatik-dengan-vanuatu-perlu-ditinjau-kembali

5	Liputan6	“Vanuatu Angkat Bicara Merespon Kecaman Keras RI soal Isu Papua” https://www.liputan6.com/global/read/3885098/vanuatu-angkat-bicara-merespons-kecaman-keras-ri-soal-isu-papua
6	Detiknews	“Vanuatu Negara Yang Mendukung Gerakan Separatis di Papua” https://news.detik.com/berita/d-4728070/vanuatu-negara-yang-mendukung-gerakan-separatis-di-papua
7	TheJakarta Post	“Vanuatu is ‘pot calling kettle black’. Says envoy” https://www.thejakartapost.com/news/2018/10/01/vanuatu-pot-calling-kettle-black-says-envoy.html
8	BBC Indonesia	“Tuntutan kemerdekaan Papua, RI-KNPB <i>berebut pengaruh</i> ” https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160413_indonesia_papua_melanesia

Di samping terdapat media yang melakukan framing netral, terdapat beberapa media yang melakukan framing negatif terhadap dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua. Di antara beberapa media yang melakukan framing atau pemberian opini negatif adalah sebagai berikut;

Tabel 3. Daftar Framing Media Negatif di Indonesia		
1	Jawapos	“Kekejaman OPM dan Manuver Berbahaya Manuver Berbahaya Vanuatu Yang Dukung Papua Merdeka” https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/02/09/118598/kekejaman-opm-dan-manuver-berbahaya-vanuatu-yang-dukung-papua-merdeka

2	Harianterbit	“Perlu Penetapan OPM Sebagai Teroris” https://www.harianterbit.com/opini/read/115801/Perlu-Penetapan-OPM-Sebagai-Teroris
---	--------------	--

Sementara ada framing dari media-media lokal dan nasional yang melaksanakan peliputan dengan *headline* maupun opini yang positif terhadap pergerakan Vanuatu dan gerakan kemerdekaan Papua. Di antaranya beberapa media tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Daftar Framing Media Positif di Indonesia		
1	Suarapapua	“Dukungan Untuk West Papua Selalu Penting Bagi Vanuatu” https://suarapapua.com/2019/07/02/dukungan-untuk-west-papua-selalu-penting-bagi-vanuatu/
2	Abc.net.au	“Perjuangan Papua Merebut Kemerdekaan dari Indonesia Kian Intensif Dengan Hasil Mematikan” https://www.abc.net.au/indonesian/2020-05-12/perang-rahasia-papua-barat-dengan-indonesia-untuk-kemerdekaan/12239254
3	Jubi.co.id	“Markus Haluk: Vanuatu selalu setia mendukung kemerdekaan Papua” https://jubi.co.id/markus-haluk-vanuatu-selalu-setia-mendukung-kemerdekaan-papua/
4	Seru.co.id	“Negara Kecil Vanuatu Sindir HAM Papua di PBB” https://seru.co.id/negara-kecil-vanuatu-sindir-ham-papua-di-pbb/

5	Satuharapan.com	<p>“Ini Alasan Vanuatu Mati-matian Dukung Referendum Papua”</p> <p>http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ini-alasan-vanuatu-mati-matian-dukung-referendum-papua</p>
6	Indoprogres.com	<p>“Betapa Sia-sianya Menangkapi ‘Provokator’ Papua Merdeka”</p> <p>https://indoprogress.com/2019/09/betapa-sia-sianya-menangkapi-provokator-papua-merdeka/</p>
7	Modusaceh.co	<p>“Dukungan Internasional untuk Papua Merdeka”</p> <p>https://modusaceh.co/news/dukungan-internasional-untuk-papua-merdeka/index.html</p>

Di antara hadirnya media massa, pembentukan sikap masyarakat tidak hanya dihasilkan melalui komunikasi informasi dengan menggunakan media massa. Alih-alih, seperangkat pemimpin komunitas yang turut campur atau yang berpengaruh yang biasanya bertugas untuk membina ide-ide dasar yang luas sifatnya (Coplin W. D., 2003, hal. 89). Dalam hal ini, banyak pergerakan dari terbentuknya iklim opini. Di sisi pro-Indonesia, ada tandingan laman website dari “freewestpapua-indonesia” yang meliput pemberitaan negatif kepada negara Vanuatu maupun gerakan Kemerdekaan Papua. Di sisi lain, ada laman facebook “freewestpapua.media” yang konsentrasi membahas masalah Papua dan aktivitas gerakan kemerdekaan Papua.

Coplin mengatakan bahwa opini publik digunakan sebagai alat oleh pengambil keputusan dan *policy influencer* lainnya, yang seolah-olah sekadar suatu kekuatan yang mengarahkan para pengambil keputusan. Bahwa para pejabat

menggunakan opini publik untuk merasionalisasi tindakan-tindakan politik luar negeri, bukan untuk membentuk kebijakan. Hadirnya *mass influencers* memainkan peran penting karena mereka “menciptkan” alam perseptual bagi pengambil keputusan (Coplin W. D., 2003, hal. 91). Dengan adanya beberap framing yang ada, maka iklim opini publik dari hadirnya beberapa media di Indonesia telah memenuhi peran pentingnya mereka dalam menciptakan alam perseptual bagi pengambil keputusan yakni pemerintah Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam menjawab proses pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia pada tahun 2014-2019 atas dukungan Republik Vanuatu terhadap Kemerdekaan Papua, penelitian ini meninjau melalui determinan Kondisi Politik dalam Negeri milik William D. Cooplin. Ada empat hal aktor/influencer dalam negeri yang dapat mempengaruhi pembuat kebijakan yaitu birokrat, partai politik, kelompok kepentingan dan media massa. Aktor politik ini disebut dengan *policy influencer* yakni sebagai aktor politik domestik dalam pengambilan keputusan. Konteks ini bekerja secara timbal balik antara pengambil keputusan dan *policy influencer* sebagai *bargaining position* dalam sumber dukungannya untuk dapat mengambil keputusan. Jika ini tidak terpenuhi, maka dukungan dari *policy influencer* kepada pengambil keputusan akan hilang. Kendati pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan ini secara positif, akan tetapi mengakomodasikan sampai batas tertentu untuk dapat mengabaikan tuntutan ini

Hasil analisis yang telah dipaparkan yaitu, *pertama, bureaucratic influencer* yang disebut juga pengaruh dari birokrat dalam pengambilan keputusan yang mengacu pada individu maupun dalam eksekutif pemerintah dalam upaya membantu para pengambil keputusan menyusun, serta melaksanakan kebijakan. Kelompok-kelompok birokrat ini sering memberikan informasi untuk pengambilan keputusan serta digunakan sebagai instrumen bagi pelaksana keputusan tersebut. Hal yang

dilakukan Pemerintah Indonesia dalam hal ini dimulai dari pernyataan keras Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengatakan bahwa mengenai *sovereignty*, Indonesia tidak akan pernah mundur. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan oleh entitas di bawah Kemenlu yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru dan Vanuatu, di bawah dubes Tantowi Yahya. Tantowi Yahya melakukan tambahan kunjungan antar pejabat tinggi ke Vanuatu dan melibatkan Vanuatu dalam beberapa acara diplomasi publik di antaranya festival budaya Melanesia yang digelar di Indonesia, dan atelibat aktif berdiplomasi multilateral di Pasifik dengan menyelenggarakan beberapa acara salah satunya Expo 2019 yang mendatangkan lebih dari 20 negara. Dengan adanya upaya diplomasi maka diharapkan akan membantu Indonesia dalam menjelaskan masalah Papua ke dunia. Upaya semua ini dilakukan oleh Kemenlu sebagai langkah untuk menjawab argumen balasan dari propaganda yang gencar dilakukan kelompok kemerdekaan Papua di Vanuatu dan pasifik.

Kedua, Partisan influencer yang disebut disebut juga partai politik yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Partai politik bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politis yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Partai politik dalam negara demokrasi dianggap penting demi keberlangsungan rezim yang ada, sehingga suaranya sering didengar. Dalam hal ini semua partai politik yang terdaftar di parlemen Indonesia, menyatakan satu dukungan kuat maupun itu parpol dari pihak pemerintah dan oposisi untuk tidak sepakat dengan dukungan Vanuatu terhadap gerakan Papua merdeka. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, maka parpol di sini berperan dalam mendukung pemerintah

Indonesia mengutuk keras tindakan Vanuatu dalam dukungannya kepada gerakan Papua merdeka. Langkah selanjutnya juga dilakukan oleh institusi DPR yang mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Vanuatu dalam mencampuri urusan domestik Indonesia. Disamping Kemenlu yang dianggap kurang kuat oleh DPR RI dalam sektor diplomasi. Di sini DPR juga membantu pemerintah dalam meluruskan propaganda yang dilakukan oleh pihak Vanuatu dan gerakan Papua merdeka, dengan terlibat aktif dalam penguatan diplomasi. Petinggi-petinggi DPR hadir dalam acara Pacific EXPO 2019, untuk memberik support dalam memajukan diplomasi, ekonomi dan budaya Indonesia di kawasan pasific. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pentingnya parpol dan DPR terlibat aktif mempengaruhi tindakan pemerintah Indonesia.

Ketiga, Interest influencer yang disebut juga kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Kelompok kepentingan tidak sebesar partai politik, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber untuk mendapatkan dokumen dari pengambil keputusan. Kelompok kepentingan ini biasanya memiliki sumber finansial yang besar sebagai nilai tawar dalam mempengaruhi pengambil keputusan. Di antaranya kelompok kepentingan ini yaitu Komns HAM, Kontas, dan Aliansi Mahasiswa Papua. Semua entitas ini tidak mendukung sikap-sikap yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Seperti, Komnas HAM menyarankan Indonesia agar menjadikan Papua sebagai Prioritas untuk diselesaikan masalahnya. Kontras juga menekankan kepada Indonesia untuk menekankan bawah pendekatan represif pemerintah kepada kelompok separatis di Papua harus dihentikan. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga menyatakan sikap pro terhadap gerakan kemerdekaan Papua.

AMP menyelenggarakan demonstrasi untuk memuntut referendum di beberapa daerah di Indonesia. Semua hal ini yang dapat mempengaruhi pemerintah Indonesia yang pada akhirnya menyetujui tindakan untuk menggunakan cara-cara diplomatis.

Keempat, Mass influencer yang disebut juga opini public yang mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Opini public ini muncul dikarenakan mudahnya akses masyarakat terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan kebijakan, berita-berita yang muncul setiap hari, hingga upaya-upaya pers dalam menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat luas yang berimbas dapat mempengaruhi pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Pengaruh media-media di Indonesia dalam memberikan framing telah menciptakan alam perseptual di dalam sistem terbuka yaitu demokrasi Indonesia. Di antaranya ada 8 yang meliputi pemberitaan netral, 2 yang meliput pemberitaan dengan opini negatid, dan 7 media yang meliput pemberiaan dengan opini positif. Artinya, faktor media massa memenuhi rasionalisasi dari tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesi dalam membuat kebijakan.

Maka dari keempat faktor tersebut mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan cara-cara diplomatik dalam mengedepankan tindakan soft power ketika ingin menindaklanjuti dan merubah tingkah laku Republik Vanuatu atas dukungannya terhadap gerakan Kemerdakaan Papua.

4.2 Rekomendasi

Kontribusi penelitian ini pada subjek hubungan internasional yakni melengkapi literatur dan pembahasan pada aspek yang mempengaruhi pengambilan

kebijakan pemerintah Indonesia pada pemerintahan Jokowi atas dukungan Republik Vanuatu terhadap gerakan Kemerdekaan Papua tahun 2014-2019. Pentingnya kajian selanjutnya untuk melihat keberlanjutan isu ini ditanggapi oleh Pemerintah Indonesia pada periode kedua Jokowi dengan melihat keefektifan langkah diplomatis atau soft power yang dilakukan pemerintah Indonesia atas dukungan Republik Vanuatu terhadap gerakan Kemerdekaan Papua.



DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Ambon, F. B. (22, 10 2015). *Festival Budaya Melanesia digelar di Kupang*. Dipetik 10 15, 2020, dari antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/524975/festival-budaya-melanesia-digelar-di-kupang>
- Amindoni, A. (2018, Desember 13). *Organisasi Papua Merdeka yang menuntut pemisahan Papua dari Indonesia, apa dan siapa mereka?* Dipetik Mei 18, 2019, dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502>
- Antarnews. (2019, Januari 31). Diambil kembali dari DPR kecam tindakan Vanuatu selundupkan Benny Wenda dalam delegasinya: <https://www.antaranews.com/berita/793555/dpr-kecam-tindakan-vanuatu-selundupkan-benny-wenda-dalam-delegasinya>
- Ashari, Y. (2016). *Hubungan Kerjasama Indonesia dan Negara Pasifik Selatan*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Ashdiana, I. M. (2011). Diambil kembali dari Hasyim: Tetap Waspadai Gerakan Papua Merdeka: <https://internasional.kompas.com/read/2011/11/30/22081088/hasyim.tetap.waspadai.gerakan.papua.merdeka>
- Aspinall, E. (2005, Agustus). Aceh/Indonesia Conflict Analysis and Options for Systemic Conflict Transformation. *Australian National University*, 6-9.
- Bayage, A. (2019, Juli 07). Diambil kembali dari Tiga Organisasi Militer Papua Bersatu Dalam WPA: <https://suarapapua.com/2019/07/07/tiga-organisasi-militer-papua-bersatu-dalam-wpa/>

Channel News Asia. (2019, Januari 28). *West Papuan separatists hand petition to UN human rights chief*. Dipetik 05 18, 2019, dari Channel News Asia:
<https://www.channelnewsasia.com/news/asia/west-papuan-separatists-hand-petition-to-un-human-rights-chief-11173486>

Coplin, W. D. (1992). *Pengantar Politik Internasional: suatu Telaah Teoritis*. Bandung: CV. Sinar Bandung.

Coplin, W. D. (1992). *Pengantar politik Internasional: Suatu Telaah teoritis*. Bandung: Cv. Sinar Bandung.

Coplin, W. D. (1992). *Pengantar Politik Internasional: suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Cv. Sinar Bandung.

Coplin, W. D. (1992). *Pengantar Politik Internasional: suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Cv. Sinar Bandung.

Coplin, W. D. (1992). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah teoritis*. Bandung: CV. Sinar Bandung.

Coplin, W. D. (2003). *Pengantar Politik Internasional: suatu Telaah Teoritis*. Bandung: CV. Sinar Baru Algensindo.

Daily Post Vanuatu. (2019, Agustus 17). Diambil kembali dari https://dailypost.vu/news/ulmwp-chair-welcomes-historic-resolutions-on-west-papua-by-forum/article_16b7a023-1dc4-5d19-b4d4-b6ca3ec210a6.html

Dayana, A. S. (2019, Agustus 29). Diambil kembali dari Deretan Produk Persenjataan PT Pindad, dari Senjata hingga Tank: <https://tirto.id/deretan-produk-persenjataan-pt-pindad-dari-senjata-hingga-tank-egA6>

Doherty, B. (2019). Diambil kembali dari Indonesia anger as West Papua independence raised at Pacific forum: <https://www.theguardian.com/world/2019/aug/12/indonesia-angered-as-west-papua-independence-raises-its-head-at-pacific-forum>

- DPR . (2018, Oktober 01). Diambil kembali dari DPR Minta Pemerintah Tinjau Kembali Hubungan Diplomatik dengan Vanuatu: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22371/t/DPR+Minta+Pemerintah+Tinjau+Kembali+Hubungan+Diplomatik+dengan+Vanuatu>
- DW. (2018, Mei 23). Diambil kembali dari Diplomasi Indonesia Picu Perang Mulut Antara Fiji dan Kep. Salomon: <https://www.dw.com/id/diplomasi-indonesia-picu-perang-mulut-antara-fiji-dan-kep-salomon/a-43097730>
- Elmslie, J. (2015). Indonesian Diplomatic Maneuvering in Melanesia: Challenges and Opportunities. Dalam *Regionalism, Security & Cooperation in Oceania* (hal. 172). Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center Security Studies.
- Garneshia, I. (2019, September 04). Diambil kembali dari Penambahan Personel TNI-Polri: Papua Semata 'Aset Vital Nasional': <https://tirto.id/penambahan-personel-tni-polri-papua-semata-aset-vital-nasional-ehsb>
- Globalfirepower. (2019). *Globalfirepower*. Diambil kembali dari Asian-Pacific Powers Ranked by Military Strength: <https://www.globalfirepower.com/countries-listing-asia-pacific.asp>
- Hasugian, M. R. (2019). Diambil kembali dari Vanuatu Abaikan Kritik Pemerintah RI, Tetap Dukung Papua Merdeka: <https://dunia.tempo.co/read/1171567/vanuatu-abaikan-kritik-pemerintah-ri-tetap-dukung-papua-merdeka>
- Hasyim. (2019, September 29). Diambil kembali dari Indonesia Kecam Vanuatu Sebagai Pendukung Separatisme Papua: <https://mediaindonesia.com/read/detail/262429-indonesia-kecam-vanuatu-sebagai-pendukung-separatisme-papua>
- IPAC. (2015, Agustus 24). The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement. *IPAC Report No.21*, 34.

- Jawapos. (2019, Agustus 29). Diambil kembali dari Pemerintah Diminta Kedepankan Langkah Persuasif kepada Warga Papua: <https://www.jawapos.com/nasional/20/08/2019/pemerintah-diminta-kedepankan-langkah-persuasif-kepada-warga-papua/>
- Katadata. (2018, Januari 15). Diambil kembali dari Desember 2018, Nilai Ekspor dan Impor Indonesia Turun: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/15/desember-2018-nilai-ekspor-dan-impor-indonesia-turun>
- Kemlu. (2019, 08 04). *Melanesian Spearhead Group (MSG)*. Dipetik 10 15, 2020, dari kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/128/halaman_list_lainnya/melanesian-spearhead-group-msg
- kppip. (2017). Diambil kembali dari <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/>
- Kumparan. (2019, Januari 31). Diambil kembali dari DPR Kecam Vanuatu, Desak Penguatan Diplomasi Indonesia: <https://kumparan.com/kumparannews/dpr-kecam-vanuatu-desak-penguatan-diplomasi-indonesia-1548930277398745919>
- Kurniati, D. (2018, Mei 08). *Kerja Sama Indonesia dengan Negara Pasifik, Redam Isu Kemerdekaan Papua?* Dipetik Mei 18, 2019, dari KBR: https://kbr.id/nasional/05-2018/kerja_sama_indonesia_dengan_negara_pasifik_redam_isu_kemerdekaan_papua_/96018.html
- Kusnandar, V. B. (2019, September 27). Diambil kembali dari Persentase Ekspor Barang dan Jasa Indonesia terhadap PDB Terus Turun: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/27/persentase-ekspor-barang-dan-jasa-indonesia-terhadap-pdb-terus-turun>

- Laucereno, S. F. (2019, Mei 18). Diambil kembali dari Ini Daftar Negara yang Paling Banyak Berikan Utang ke RI: <https://finance.detik.com/moneter/d-4554749/ini-daftar-negara-yang-paling-banyak-berikan-utang-ke-ri>
- Liputan6. (2018, Januari). Diambil kembali dari Impor Senjata Melonjak 677 persen pada Januari 2018: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3289476/impor-senjata-melonjak-677-persen-pada-januari-2018>
- Liputan6. (2019, Desember 06). Diambil kembali dari Ekspor Indonesia di Desember 2019 naik 377 persen tertinggi sektor pertanian: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4156049/ekspor-indonesia-di-desember-2019-naik-377-persen-tertinggi-sektor-pertanian>
- Lusmawati. (2019, Februari 01). Diambil kembali dari <https://hot.grid.id/read/181622854/cari-muka-ke-pbb-pentolan-opm-putar-balik-fakta-pembantaian-pekerja-trans-papua-di-nduga?page=all>
- MacLeod, J. (2011). The struggle for self-determination in West Papua (1969-present). *International Center on Nonviolent Conflict*, 14.
- Majalah Tempo. (2017, Desember 17). Diambil kembali dari Presiden Nauru : Kami Telah Berubah Soal Papua: <https://majalah.tempo.co/read/154548/presiden-nauru-baron-divavesi-waqa-sikap-kami-soal-papua-berubah>
- Medcom. (2018, September 13). Diambil kembali dari <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/zNAL112K-menlu-indonesia-tak-akan-mundur-jaga-kedaulatan-papua>
- Media Indonesia. (2019, Juli 12). Diambil kembali dari DPR Dukung Penguatan Diplomasi Indonesia Kawasan Pasifik: <https://mediaindonesia.com/read/detail/246627-dpr-dukung-penguatan-diplomasi-indonesia-kawasan-pasifik>

- Mishael, G. (2016). KEBIJAKAN OPERASI MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Diponegoro Law Review*, 5(2).
- Morehouse, P. M. (1994). *Beginning Qualitative Research : A Philosophic and Partical Guide* . Bristol: The Flamer Press.
- Muhaimin. (2017, Mei 15). *Tujuh Negara Pasifik Usik Papua Lagi, Indonesia Kesal*. Dipetik 05 18, 2019, dari SINDONEWS.com: <https://international.sindonews.com/read/1205265/40/tujuh-negara-pasifik-usik-papua-lagi-indonesia-kesal-1494839551>
- MUSFIROH, M. S. (2018). The Melanesian Spearhead Group in terms of Indonesia's interest. *University of Muhammadiyah Malang*, 8.
- Nainggolan, P. P. (2014). Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme papua. *Kajian Vol. 19 No. 3 September hal. 781-X99*.
- Octaviani, P. R. (2019, Februari 01). *Pemerintah Jangan Terjebak Manuver Vanuatu*. Dipetik Mei 18, 2019, dari Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/read/detail/214265-pemerintah-jangan-terjebak-manuver-vanuatu>
- Omega, V. (2017). Disaster Relief As Indonesia Soft Power Diplomacy Case of Cyclone Pam in Vanuatu.
- Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Vanuatu Dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional* □ *Tahun XI, No.1, Januari - Juni 2018*, 18.
- Sahroji, A. (2017, September 27). *Ini Delapan Pemberontakan Paling Besar dalam Sejarah Indonesia, Nomor Satu Paling Populer*. Dipetik Mei 18, 2019, dari Okenews: <https://nasional.okezone.com/read/2017/09/28/337/1785031/ini->

delapan-pemberontakan-paling-besar-dalam-sejarah-indonesia-nomor-satu-paling-populer

Santoso, Y. I. (2019, Juli 30). Diambil kembali dari Berikut 5 negara dengan investasi terbesar di Indonesia: <https://nasional.kontan.co.id/news/berikut-5-negara-dengan-investasi-terbesar-di-indonesia?page=all>

Saputra, E. Y. (2018, Desember 6). *Ini Alasan PBB Tolak Kemerdekaan Papua Barat*. Dipetik 05 18, 2019, dari TEMPO.CO: <https://dunia.tempo.co/read/1152838/ini-alasan-pbb-tolak-kemerdekaan-papua-barat/full&view=ok>

Sari, A. P. (2015, Mei 15). Diambil kembali dari Vanuatu Berencana Buka Kedutaan Besar di Jakarta: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150419173000-106-47729/vanuatu-berencana-buka-kedutaan-besar-di-jakarta>

Sihombing, M. (2018, September 28). Diambil kembali dari Vanuatu Usik Teritori Indonesia, JK Tebarkan Ancaman di PBB: <https://kabar24.bisnis.com/read/20180928/15/843357/vanuatu-usik-teritori-indonesia-jk-tebarkan-ancaman-di-pbb>

Suara Papua. (2014). Diambil kembali dari KNPB PNWP dan PRD Dukung Vanuatu Bawa Masalah Papua Barat ke PBB: <https://suarapapua.com/2015/04/21/knpb-pnwp-dan-prd-dukung-vanuatu-bawa-masalah-papua-barat-ke-pbb/>

Sudrajat. (2017, Agustus 01). Diambil kembali dari Negara Pasifik Perlu Dirangkul Untuk Jaga Papua: <https://news.detik.com/berita/d-3581282/negara-pasifik-perlu-dirangkul-untuk-jaga-papua/komentar>

- Tampubolon, L. K. (2015). Kerjasama Teknik Indonesia - Melanesian Spearhead Group Terhadap Keutuhan NKRI di Papua Tahun 2011-2014. *JOM FISIP Volume 2 No. 2 Oktober 2015*, 15.
- Temaluru, T. B. (2016). Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 2, Juni 2016*, 12.
- Tempo. (2019, September 19). Diambil kembali dari Pemerintah Australia Tadinya Ingin Timor Leste Tetap Jadi Bagian NKRI: <https://www.tempo.co/abc/4635/pemerintah-australia-tadinya-ingin-timor-leste-tetap-jadi-bagian-nkri>
- United Liberation Movement for West Papua Official Website. (2018). *One People, One Soul*. Dipetik 05 18, 2019, dari <https://www.ulmwp.org/ulmwp>
- United Liberation Movement for West Papua Official Website. (2018). *One People, One Soul*. Dipetik 05 18, 2019, dari <https://www.ulmwp.org/ulmwp>
- Voa Indonesia. (2017, Maret 02). *7 Negara Pulau Pasifik Desak PBB Selidiki Pelanggaran HAM di Papua*. Dipetik Mei 18, 2019, dari Voa Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/negara-pulau-pasifik-desak-pbb-pelanggaran-ham-papua/3746422.html>
- World Bank. (2018). Diambil kembali dari Gross Domestic Product 2018: <https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>
- World Bank. (2019, September 29). Diambil kembali dari <https://www.worldbank.org/en/country/pacificislands/overview>
- Wospakrik, D. (2018). Gerakan Separatisme di Papua mengurai konflik dan solusi penyelesaian Papua-Jakarta. *Universitas Cendrawasih*.
- Zed, M. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Buku Obor.